

Hadiyati Lulus Cumlaude



SM/Hari Santoso

SERAHKAN IJAZAH DOKTOR : Dekan FISIP Undip Agus Hermani menyerahkan ijazah doktor kepada Hadiyati Munawaroh di gedung Pascasarjana, kemarin. (37)

SEMARANG - Auditor BPK Hadiyati Munawaroh SE Akt MAk, lulus ujian promosi terbuka doktor dengan predikat *cumlaude* dari Program Studi Doktor Administrasi Publik Undip. Dia memperoleh IPK 3,76.

Promovenda menyajikan disertasi berjudul "Implementasi Kebijakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemkot Semarang". Disertasi diuji oleh Prof Indra Bastian dari UGM dan dihadiri Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

"Kota Semarang sebagai kota pertama dan satu-satunya di

Indonesia yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual menarik perhatian saya. Pengimplementasian SAP berbasis akrual di Kota Semarang juga semakin baik, meskipun banyak kendala dan hambatan," tutur kepala Sub-Auditorat Jawa Tengah I pada BPK Perwakilan Jateng ini.

Hadiyati melakukan penelitian di bawah bimbingan Prof Dr Dra Sri Suwatri MSi (promotor), Prof Drs Y Warella MPA PhD (*co promotor*), dan Dr Kismartini MSi (*co promotor*).

Alumnus Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan, masih ada 528 pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan SAP berbasis akrual, meski peraturan perundangan telah mengamanatkan batas waktu akhir pengaplikasiannya pada 2015. Pemkot Semarang dipandang sangat bagus dalam menaati peraturan.

Peraih gelar S-2 dari UI ini juga menilai Kota Semarang berhasil dengan baik menerapkan SAP. Keberhasilan ini ditandai dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan

keuangan tahun 2012 dan 2013.

Oleh BPK, materi laporan yang disajikan dinilai sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Keberhasilan ini yang membuat Semarang ditunjuk sebagai pusat pengembangan implementasi laporan berbasis akrual lembaga ekonomi dunia SECO. Sejak 2012, kurang lebih 528 pemkab-pemkot di Indonesia belajar mengenai SAP berbasis akrual di Kota Semarang.

Kurang Memadai

Menurut Hadiyati, kendala pengaplikasian SAP berbasis akrual di Kota Semarang, di antaranya kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun pemerintah pusat kurang memadai dan dikomunikasikan dengan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak konsisten dengan SAP berbasis akrual. Selain itu, sumber daya manusia yang kurang memadai serta fragmentasi unit kerja yang tidak didukung koordinasi antar unit kerja menjadikan penerapan SAP berbasis akrual berkendala.

Dia memberikan rekomendasi untuk perbaikan SAP berbasis akrual di Kota Semarang, yakni komunikasi kebijakan SAP berbasis akrual ke pemerintah pusat, penyediaan SDM unggul, sistem informasi keuangan yang terkomputerisasi dan terintegrasi, evaluasi SOP atas fragmentasi unit kerja. (H41-37)